

Mencari Nakhoda KPK

PRESIDEN Jokowi telah mengangkat beberapa pakar dari berbagai bidang menjadi tim penyeleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan datang sehubungan dengan komisioner yang ada sekarang akan mengakhiri masa pengabdian. KPK merupakan lembaga yang berdasarkan hasil survei masih mendapat apresiasi dari masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi. Persepsi masyarakat terhadap KPK masih tinggi dan positif bila dibanding dengan lembaga penegakan hukum lainnya dalam memberantas korupsi.

Menilik prestasi komisioner yang ada sekarang, walaupun masih menaruh harapan, masyarakat juga memberikan kritik terhadap kinerja KPK karena sepanjang masa pengabdian pimpinan yang sekarang, lembaga ini hanya mampu melakukan OTT, tetapi nihil dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus korupsi. Dalam pengertian, KPK tidak mampu mengungkap kasus korupsi melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan biasa. Seolah-olah kasus korupsi tidak banyak terjadi.

KPK minim dalam pengungkapan kasus korupsi melalui penyelidikan dan penyidikan biasa. Pertama, sebagaimana diketahui bahwa dalam masa kepemimpinan komisioner sekarang terjadi friksi di lingkungan internal KPK terutama di deputi penindakan, sehingga mengganggu mekanisme kerja dan semangat para penyidik untuk mengungkap kasus korupsi.

Surat terbuka karyawan KPK terhadap pimpinan menunjukkan, lembaga ini kerepotan menertibkan para pegawainya



Edi Setiadi

Rekor Unisba

dan berimplikasi pada kinerja secara keseluruhan.

Kedua, pengangkatan penyidik internal KPK juga menimbulkan diskriminasi dari penyidik lainnya yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Secara kasatmata, penyidik internal ini minim pengalaman dibanding dengan penyidik lainnya padahal tugas mereka menuntut keahlian, pengalaman, dan ketangguhan. Dengan demikian, profesionalisme harus mendapat perhatian dari pimpinan KPK.

Ketiga, secara tersirat masyarakat meragukan independensi komisioner karena dianggap kadang-kadang bermain dalam ranah politik praktis, padahal lembaga ini harus bebas dari berbagai kepentingan kecuali kepentingan memberantas korupsi. Bermain-main dalam politik praktis akan membawa KPK ke dalam kancah pertempuran berbagai kepentingan yang jauh dari tugas-tugas memberantas korupsi.

Keempat, persepsi masyarakat terhadap pimpinan KPK sekarang, KPK telah kehilangan muruah sebagai lembaga yang digjaya dalam memberantas korupsi hanya karena kalaupun melakukan OTT, nilai kerugian atau nilai hasilnya tidak perlu KPK yang melakukannya.

Panitia seleksi pimpinan KPK diharapkan dapat menghasilkan komisioner yang mumpuni karena kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 terutama dalam hal kon-

sideran huruf b menimbang yang mengatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, maka mau tidak mau lembaga ini harus lebih profesional dari kepolisian dan kejaksaan.

Panitia harus menghasilkan lima komisioner sesuai dengan amanat pasal 21 ayat (1) huruf a dengan susunan personalia sebagaimana disebut dalam pasal 21 ayat (2) huruf a dan bnya sehingga mampu memimpin, karena KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

Panitia seleksi jangan menutup dari dari saran, masukan, dan kritik dari masyarakat. Satu hal lagi yang penting dan ini menurut saya adalah salah yaitu rekrutmen dilakukan secara terbuka, sehingga semua orang yang memenuhi syarat administratif sesuai dengan ketentuan panitia bisa mendaftar.

Konsekuensinya, pengangguran pun dalam arti pencari kerja dapat mengadu nasib untuk menjadi pimpinan KPK. Dengan demikian akan menghambat orang-orang yang benar-benar mempunyai komitmen tetapi rendah hati (tawadu) tidak mau mendaftar atau barangkali tidak diminta oleh panitia seleksi.

Mencari orang berintegritas memang tidak mudah. Akan tetapi, rekrutmen secara terbuka akan menghalangi orang-orang ini untuk mendaftar. Sebaiknya panitia melakukan cara jemput bola dengan mendatangi para profesional di bidang hukum, ekonomi atau perguruan tinggi hukum yang dibutuhkan sebagai pimpinan KPK dan diberi pengertian bahwa ini soal panggilan jiwa.

Secara karakteristik pimpinan KPK yang akan datang sebaiknya diisi oleh orang-orang yang punya pengalaman di bidang penyidikan, penuntutan dan intelijen di samping kemampuan di bidang sosial dan ekonomi. Mengingat tindak pidana korupsi punya karakteristik melibatkan berbagai orang dengan disiplin yang beragam.

Mencari pimpinan KPK yang benar-benar independen itu sulit, karena di samping dalam seleksi melibatkan parpol maka keberpihakan itu tidak akan hilang sama sekali. Berbagai kepentingan akan berkelindan dengan upaya-upaya yang idealis. Akan terjadi pertempuran antara mempertahankan hegemoni terhadap kekuasaan yang cenderung korup dan kelompok antikorupsi.

Di sinilah panitia seleksi harus mampu menari di antara tabuhan gendang berbagai kepentingan, sehingga mendapatkan pimpinan KPK yang mendekati harapan masyarakat atau paling tidak sesuai dengan alasan pendirian KPK ini.

Dalam masa lebih dari satu dasawarsa berdirinya KPK, terlihat bahwa KPK lebih banyak melakukan tugas penindakan atau represif, akan tetapi tidak pernah terdengar tugas-tugas pencegahan. Padahal kasus korupsi diyakini bukan hanya

Ole-Ole

botram

BANDARA Kerta-jati jadi tempat botram.

- Masyarakat Indonesia memang kurang piknik.

lapas

PENGELOLAAN lapas harus dibenahi.

- Biar napinya gak bisa bebas jalan-jalan.

cebong

STOP sebutan cebong dan kampret.

- Sudah waktunya "move on".

Si Kabayan

persoalan hukum, tetapi termasuk di dalamnya faktor-faktor lain terutama sifat *anomie of success* dari sebagian kecil masyarakat terutama yang mempunyai kekuasaan karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang berasal dari dimensi kekuasaan.

Sudah waktunya pimpinan KPK yang akan datang menyinergikan politik kriminal dalam pemberantas korupsi melalui pendekatan penal dan pendekatan nonpenal.

Pendekatan penal selalu dipublikasikan, tetapi pendekatan nonpenal sepi dari pemberitaan. Apakah memang tidak ada upaya dari KPK atau media tidak meliput dan memberitakannya. Semoga pimpinan KPK yang akan datang mampu menyinergikan politik kriminal dalam memberantas korupsi.***